

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang
yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

AGNY GALLUS PRATAMA
NIM. C2C009094

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2013

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang
yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

AGNY GALLUS PRATAMA
NIM. C2C009094

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Agny Gallus Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009094
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH**

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DAN KINERJA LINGKUNGAN
TERHADAP
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur
dan Tambang yang Terdaftar pada
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)

Dosen Pembimbing : Dr. H. Rahardja, SE., M.Si, Akt.

Semarang, 21 Juni 2013
Dosen Pembimbing



(Dr. H. Rahardja, SE., M.Si, Akt.)
NIP 19491114 198001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Agny Gallus Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009094

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH**

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DAN KINERJA LINGKUNGAN

TERHADAP

PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur

dan Tambang yang Terdaftar pada

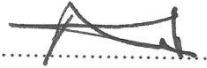
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan

Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 Juli 2013

Tim Penguji :


1. Dr. H. Rahardja, SE., M.Si, Akt.

(..........)

2. Dr. Agus Purwanto, SE., M.Si, Akt.

(..........)

3. Dul Muid, SE., M.Si, Akt.

(..........)


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agny Gallus Pratama, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)”** , adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 Juni 2013

Yang membuat pernyataan,



(Agny Gallus Pratama)

NIM : C2C009094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa yang meringankan derita seorang mu’min di dunia, maka Allah akan meringankan satu derita hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akherat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia akherat. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya masuk ke dalam surga...” (HR. Imam Muslim)

“Man Jadda Wajada”

Siapa yang bersungguh sungguh ia akan berhasil

“Man Shabara Zhafira”

Siapa yang bersabar akan beruntung

“Man Sara Ala Darbi Washala”

Barangsiapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,
untuk adik-adikku,
untuk keluarga besarku,
untuk calon istriku (insyaallah),
untuk dosen dan teman-temanku,
Terima kasih atas semua doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang
yang telah diberikan*

ABSTRACT

The research was conducted on mining and manufacturing companies to determine the effect of GCG (Good Corporate Governance) that was proxied by (the proportion of independent board, board size, number of board meetings, and the size of the audit committee) and the environmental performance against corporate environmental disclosure. Issuance of PP No. 47 Tahun 2012 tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" which is the implementing regulations of UU No. 40 Tahun 2007 on "Perseroan Terbatas" Bab V, pasal 74 makes the company must take responsibility for its activities in the social and environmental fields and must be contained in the annual report company. Long period of publication time of PP (5 years) become a question whether the company conducts environmental disclosure eventhough still voluntary. The factors that make a company willing to express their environment disclosure is good corporate governance (GCG) and environmental performance. In the GCG, the principle of accountability, responsibility, and transparability of a company become a reason for company todo environemtal disclosure. Beside that, the company's environmental performance is also good reason whether the company will do environmental disclosure. To facilitate assessing how well the quality of environmental disclosure, standard of Global Reporting Index (GRI) 3.1 that was commonly used by companies in Indonesia was used.

The population of this study is manufacturing and miningl companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) and including PROPER in 2009-2011. The total study observations was 85. Sampling technique using purposive sampling method. Techniques of data analysis done by hypothesis testing using multiple linear regression method.

Results of this study showed that the proportion of independent board, board size, and the size of the audit committee no significant effect on environmental disclosure. Meanwhile,there are significant effect on the environmental performance and board meetings to environmental disclosure.

Keywords: *Environmental Disclosure, GRI, Mining and Manufacturing, Good Corporate Governance, Environmental performance, PROPER*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan tambang dan manufaktur untuk mengetahui pengaruh GCG (*Good Corporate Governance*) yang diproksikan dengan (proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, dan ukuran Komite Audit) dan kinerja lingkungan terhadap luas pengungkapan lingkungan. Diterbitkannya PP No 47 Tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” yang merupakan peraturan pelaksana UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” Bab V pasal 74 membuat perusahaan wajib mempertanggung jawabkan aktivitasnya dalam bidang sosial dan lingkungan dan harus tertuang dalam laporan tahunan perusahaan. Rentang waktu yang lama hingga PP terbit PP (selama 5 tahun) menjadi suatu pertanyaan apakah perusahaan akan berinisiatif melakukan pengungkapan lingkungan walaupun belum diwajibkan. Faktor-faktor yang membuat perusahaan bersedia mengungkapkan lingkungannya ialah tata kelola pemerintah yang baik (GCG) dan kinerja lingkungannya. Di dalam GCG, asas akuntabilitas, responsibilitas, dan transparabilitas menjadi alasan perusahaan agar mengungkapkan lingkungan. Sedangkan kinerja lingkungan perusahaan yang baik juga merupakan alasan apakah perusahaan akan mengungkapkan lingkungannya. Untuk mempermudah menilai seberapa baik kualitas pengungkapan lingkungan, digunakanlah standar *Global Reporting Index* (GRI) 3.1 yang sudah umum digunakan oleh perusahaan di Indonesia.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan tambang dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk dalam PROPER tahun 2009-2011. Total observasi penelitian adalah 85. Teknik sampling menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Sementara itu, kinerja lingkungan dan rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

Kata kunci : Pengungkapan lingkungan, GRI, Pertambangan dan Manufaktur, Good Corporate Governance, Kinerja lingkungan, PROPER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN INERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Dr. H. Rahardja, Msi., Akt. (Pembimbing Skripsi) yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing dan memotivasi dengan penuh kesabaran serta keikhlasan. Semoga semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat.
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Drs. Sudarno, Msi, Akt. Phd. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam menjalani masa perkuliahan.

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Orang tua tercinta. Bapak (Tri Agung Sucahyono) dan Ibu (Mimi Mulyani) yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa sepanjang hayat. Selain itu, beliau telah rela berkorban segalanya dalam memberikan nasihat hidup yang membimbing Penulis menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan orang tua.
7. Adik-adik tersayang. Luthfi Gani Hakim dan Bunga Gina Triani yang selalu menjadi penyemangat agar bisa menjadi contoh kakak dan teladan yang baik.
8. Keluarga besar penulis. Kakek, *Eyang* putri, *Aki* Bandung, terima kasih buat doanya dan kasih sayang selama ini.
9. Hoirun Nieza Susanti, yang selalu memberi cinta, dukungan, dan doa. Bagi Penulis, kamu adalah *The Special One* sehingga Penulis selalu berusaha untuk meng-*improve* diri agar tidak kalah darimu.
10. Keluarga besar Unit Pengembangan Komputer Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Rudi, Hakim, Tara, Ayu, Putera, Mas Singgih, Mas Syam, Mas Icha, Mas Adit, Mas Munir, Mas Panji, Mbak Dini, Mbak Mega, Mbak Retno, Mas Mirwan, Mas Witcak, Pak Adit dan adik-adik angkatan (Nuzul, Adit, Join, Axel, Silvi, Sofie, Sani, Bobbi). Beruntung sekali penulis dapat bergabung di organisasi tercinta ini. Terima kasih sekali, karena selama 3 tahun lebih di UPKFEB , penulis merasa mendapat

perubahan yang berarti dalam hidup yaitu pembelajaran bahwa tidak hanya *hardskill* yang dibutuhkan tetapi juga *softskill*, dan memberi bekal bagi kehidupan penulis di masa yang akan datang.

11. Keluarga Besar ZIS. Mas Bisri, Masi Iqbal, Rudi, Putera, Teguh, dan Theda yang telah memberikan bekal berupa *softskill*, sehingga akan berguna bagi kehidupan penulis di masa yang akan datang.
12. Keluarga besar English Club. Bang Maftuh Effendi, Miss Mira, Astri, Dimas, dan Nugroho yang selama hampir 2 tahun selalu memberi nasihat serta menambah kemampuan bahasa inggris penulis.
13. Teman-teman *Speechless CL+*, Theda dan Leditya, yang selalu mengingatkan perihal SKRIPSI disamping usaha yang kita jalani bersama. Semoga usaha kita bisa semakin sukses dan Omzet selalu meningkat ya!
14. Teman-teman spesial penulis yaitu Rudi, Teguh, Putera dan Siska. Untuk Rudi, Teguh dan Putera, terima kasih atas semua nasihat kepadaku selama ini, mari kita menjadi *YONKOU*. Untuk Siska, terima kasih telah mau mengajak penulis mengikuti beberapa lomba sehingga penulis mempunyai prestasi selama menjalani kuliah ini.
15. Teman-teman KKN. Adit, Kiki, Mbak Titi, Puji, Lian, dan Fikri yang selalu mengingatkan penulis untuk berlomba-lomba dalam menyelesaikan skripsi.
16. Ahlan, teman kos yang selama 3 tahun telah menemani.

17. Seluruh teman-teman Akuntansi 2009 Reguler I Universitas Diponegoro Semarang, terima kasih telah memberikan 3,5 tahun yang sangat bermakna pada hidup penulis.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 21 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Legitimasi.....	14
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	15

2.1.3	<i>Good Corporate Governance</i>	18
2.1.4	Dewan Komisaris dan Komite Audit sebagai proksi GCG	23
2.1.4.1	Dewan Komisaris.....	23
2.1.4.2	Komite Audit	26
2.1.5	<i>Corporate Social Responsibility</i>	29
2.1.6	Kinerja lingkungan	32
2.1.7	Pengungkapan Lingkungan.....	34
2.2	Penelitian Terdahulu	38
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis	41
2.4	Perumusan Hipotesis	43
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	52
3.1.1	Pengungkapan lingkungan	52
3.1.2	Proporsi Komisaris Independen	53
3.1.3	Ukuran Dewan Komisaris.....	53
3.1.4	Jumlah Rapat Dewan Komisaris.....	54
3.1.5	Ukuran Komite Audit	54
3.1.6	Kinerja lingkungan	54
3.2	Penentuan Populasi dan Sampel	56
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	56
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	57
3.5	Metode Analisis	57
3.5.1	Statistik Deskriptif	57

3.5.2	Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.....	57
3.5.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	60
3.5.4	Uji Statistik F.....	60
3.5.5	Pengujian Hipotesis	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	63
4.2	Analisis Deskriptif Statistik.....	64
4.3	Uji Asumsi Klasik	67
4.3.1	Uji Normalitas.....	67
4.3.2	Uji Heteroskedastisitas	68
4.3.3	Uji Multikolinearitas.....	69
4.3.4	Uji Autokorerasi.....	70
4.4	Analisis Regresi Berganda.....	71
4.5	Uji Simultan (Uji F).....	72
4.6	Koefisien Determinasi	73
4.7	Uji Hipotesis	74
4.8	Interpretasi Hasil.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Keterbatasan Penelitian	84
5.3	Saran.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Peringkat PROPER.....	33
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4.1	Proses Seleksi Objek Penelitian.....	64
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.3	Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).....	68
Tabel 4.4	Uji Glejser.....	69
Tabel 4.5	Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.6	Uji Autokolerasi.....	69
Tabel 4.7	Hasil Uji t.....	70
Tabel 4.8	Hasil Uji F.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian	42
Gambar 4.1 Indeks Pengungkapan lingkungan.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A TABEL INDEKS GRI (LINGKUNGAN) 3.1.....	90
LAMPIRAN B DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL.....	92
LAMPIRAN C HASIL OLAH DATA STATISTIK.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan suatu aspek yang sering dibahas dalam kegiatan ekonomi, hal ini dikarenakan dampaknya terhadap kerusakan ekosistem. Untuk menghindari hal tersebut maka seluruh kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu peran dari para pelaku ekonomi. Salah satu pelaku ekonomi yang sering dijadikan penyebab permasalahan lingkungan adalah perusahaan.

Perusahaan mempunyai pengaruh penting dalam roda perekonomian. Sebagai bagian dalam roda perekonomian, perusahaan berperan sebagai penyedia barang dan jasa, pembayar pajak, pengguna faktor produksi dan agen pembangunan. Namun, manfaat perusahaan dalam roda perekonomian juga tidak terlepas dari efek negatif yang ditimbulkan, salah satunya dalam bidang lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem akibat dari praktek produksi dan limbah produksi perusahaan. Hal ini disebabkan orientasi keuntungan yang tinggi dengan melakukan eksploitasi sumber daya bumi.

Paham ekonomi kapitalis merupakan faktor utama perusahaan yang hanya berorientasi pada tingginya keuntungan. Sistem kapitalis yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara

berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial (Galtung & Ikeda, 1995 dan Rich, 1996 dalam Anggraini, 2006). Perusahaan yang hanya berfokus pada tingginya keuntungan akan kesulitan untuk berkembang. Perusahaan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki pertanggungjawaban sosial atau lebih dikenal dengan sebutan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Pengertian CSR masih menjadi suatu perdebatan diantara praktisi dan akademisi. Konsep CSR adalah suatu konsep dimana perusahaan harus bertanggung jawab atas *stakeholder*-nya dalam seluruh aspek operasional perusahaan. Terdapat banyak standar mengenai CSR, salah satunya adalah standar yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Berdasarkan standar dari Bank Dunia, terdapat beberapa komponen utama dalam CSR yang meliputi (Wardhani, 2011): (1) perlindungan lingkungan, (2) jaminan kerja, (3) Hak Asasi Manusia, (4) interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, (5) standar usaha, (6) pasar, (7) pengembangan ekonomi dan badan usaha, (8) perlindungan kesehatan, (9) kepemimpinan dan pendidikan, dan (10) bantuan bencana kemanusiaan. Dalam *Safeguard Policies* (Perlindungan Lingkungan), *Operation Policy 4.00 "Piloting the Use of Borrower Systems to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-Supported Projects"*, Bank Dunia menyatakan bahwa bank sebagai pemberi dana dapat menekan perusahaan untuk fokus pada aktivitas sosial dan lingkungan dalam pendanaan dalam setiap proyeknya.

Regulasi *Corporate Social Responsibility* dalam bidang lingkungan khususnya pengungkapan lingkungan sudah banyak diberlakukan di negara-negara maju. Amerika Serikat sebagai contohnya, telah membuat regulasi mengenai lingkungan tertuang dalam *US National Environment Policy Act* (NEPA) di tahun 1970. Undang-Undang tersebut membahas tentang polusi udara, air dan tanah. Dalam aturan mengenai polusi air dalam *Clean Water Act*, perusahaan diharuskan untuk membuat laporan setiap bulan mengenai polusi air yang ditimbulkan (Chong dan Freedman, 2011). Di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tertuang dalam UU No 40 tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” pasal 74 Bab V. Disebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Selain itu, disebutkan juga bahwa terdapat sanksi sesuai apabila perusahaan tidak menjalankan hal tersebut. Namun, ketentuan mengenai hal ini akan diatur dengan PP (Peraturan Pemerintah).

Pemberlakuan hal tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU (Undang-Undang) 40 tahun 2007 ternyata menimbulkan pro dan kontra. Sukami (2010) menyatakan bahwa kalangan pelaku bisnis yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sangat keras menentang kehadiran dari pasal tersebut. Mereka beralasan bahwa kegiatan CSR berada di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, seperti : ketertiban usaha, pajak atas

keuntungan dan standar lingkungan hidup. Jika diatur kembali, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada dunia usaha terlebih menggerus keuangan suatu perusahaan.

Sikap pro terhadap pemberlakuan UU ini dapat dilihat dari beberapa penelitian dan fakta mengenai CSR. Penelitian Suprpto (2006, dalam Sukami 2010)) tentang penerapan CSR di Jakarta pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Selain itu, dapat juga dilihat dari hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan yang dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan (Sukami, 2010). Dapat disimpulkan, hanya dari 53% perusahaan yang melakukan praktek pengelolaan lingkungan.

Kinerja lingkungan yang buruk ini ternyata sesuai dengan fakta di lapangan. Salah satu contohnya adalah kinerja lingkungan yang dilakukan PT Newmount Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara menggunakan teknologi yang berbahaya di laut, yaitu pembuangan *tailing* ke laut (*submarine tailing disposal*). Teknologi ini terbukti telah mengakibatkan pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, oleh PT Newmont Minahasa Raya. Survei KLH (Kementrian Lingkungan Hidup) tahun 2004 yang dilakukan di daerah Tonggo Sejong,

Benete, dan Lahar, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan sekitar 76%-100% responden nelayan menyatakan bahwa pendapatan mereka menurun setelah Newmont membuang *tailing*-nya ke Teluk Senunu, yang besarnya mencapai 120.000 ton per hari atau 60 kali besar *tailing* Newmont di Teluk Buyat (CSR Indonesia, 2007).

Terlepas dari pro dan kontra mengenai UU No 40 tahun 2007 ini, peraturan pelaksana UU yang berupa PP (Peraturan Pemerintah) tetap diterbitkan yaitu Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”. Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan perusahaan melaporkan kinerja lingkungannya dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Jangka waktu yang lama hingga 5 tahun semakin mempertegas bahwa penerapan CSR secara wajib menimbulkan sikap kontra dari banyak pihak. Namun disisi lain, pemberlakuan CSR secara wajib ini dapat membuat perusahaan untuk dapat fokus terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Selain itu juga, pemberlakuan CSR secara sukarela dapat menimbulkan persepsi negatif apabila perusahaan melakukan CSR. Hal ini dikarenakan persepsi awal masyarakat bahwa perusahaan hanya mencari keuntungan semata, sehingga CSR merupakan suatu alat mendapatkan keuntungan. Secara teori, motif-motif perusahaan melakukan CSR dapat dijelaskan dalam teori legitimasi dan *stakeholder*.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari komponen GCG. GCG (*Good Corporate Governance*) secara definitif adalah konsep yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003 dalam Kaihatu, 2006). Manfaat dari penerapan GCG penting karena perusahaan akan mendapatkan kepercayaan penuh dalam iklim investasi sehingga keberlanjutan hidup perusahaan dapat terjaga.

Di Indonesia, pelaksanaan GCG masih bersifat sukarela sehingga tidak ada sanksi yang diberikan apabila perusahaan tidak melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun, di tahun 2012, GCG wajib diterapkan pada perusahaan BUMN. Untuk perusahaan lain, Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) hanya menyediakan kuesioner penilaian sendiri untuk melihat kualitas tata kelola perusahaannya. GCG dapat tercapai apabila perusahaan memenuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan.

Dalam asas transparansi, perusahaan diharuskan untuk memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan yang mempunyai akuntabilitas harus mempunyai laporan dampak perusahaan terhadap masyarakat. Informasi mengenai polusi (air, tanah dan udara) merupakan informasi yang harus diketahui oleh publik. Maka pengungkapan lingkungan seharusnya menjadi salah satu faktor yang harus diterapkan dalam GCG.

Dalam asas responsibilitas, maka perusahaan harus melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud tidak

hanya peraturan perusahaan, tetapi juga peraturan perundang-undangan negara dimana perusahaan tersebut berada. Walaupun peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan baru diwajibkan di tahun 2012, tetapi dengan dasar etika bisnis, maka seharusnya perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya dengan dasar UU saja.

Penelitian mengenai pengungkapan lingkungan yang dihubungkan dengan GCG maupun kinerja lingkungan masih menemukan hasil yang berbeda-beda. Chong dan Freedman (2011) meneliti mengenai *Good Corporate Governance*, Pengungkapan lingkungan, dan Kinerja lingkungan (2011) di Amerika Serikat. *Good Corporate Governance* dinilai berdasarkan skor yang telah dihitung dalam penelitian Brown dan Caylor (2006). Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa penggunaan skor dapat menilai keseluruhan *Good Corporate Governance*. Mereka mengkritisi penelitian-penelitian terdahulu yang menilai GCG dengan proksi aspek-aspek tertentu. Hal ini dikarenakan pemilihan aspek tertentu cenderung menyimpang karena dihubungkan secara langsung pada pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan. Oleh karena itu, Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa aspek yang berlainan tidak dapat dianggap sebagai indikator atau ukuran seberapa “baik” tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh antara *Good Corporate Governance* dengan pengungkapan lingkungan. Namun tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap kinerja lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian di Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan lingkungan juga dilakukan oleh Setiawan (2012). Variabel yang

digunakan tidak hanya GCG saja, tetapi Setiawan (2012) menambahkan Manajemen Laba untuk melihat pengaruhnya pada pengungkapan lingkungan. Berbeda dengan penelitian Chong dan Freedman (2011), Setiawan (2012) menggunakan proksi untuk GCG. Proporsi Komisaris Independen, Rapat Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit digunakan sebagai variabel proksi praktik GCG. Pengungkapan lingkungan dinilai dengan skor GRI (*Global Reporting Initiative*) dalam bidang lingkungan. Terdapat tiga puluh poin mengenai lingkungan yang nantinya dicocokkan dengan pengungkapan lingkungan di laporan tahunan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat satu variabel yang memberikan pengaruh signifikan, yaitu rapat Dewan Komisaris.

Terdapat penelitian mengenai pengaruh kinerja lingkungan pada pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh Handayani (2010). Kinerja lingkungan diukur dengan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang dikeluarkan oleh KLH (Kementrian Lingkungan Hidup). Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antar kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan.

Penelitian mengenai kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan juga dilakukan oleh Lindrianasari (2007). Berbeda dengan yang dilakukan oleh Setiawan (2012). Lindrianasari (2007) menyatakan bahwa GRI merupakan bagian dalam kinerja lingkungan. Walaupun begitu, kinerja lingkungan tidak diukur dengan GRI, melainkan dengan sertifikat ISO 14001. Penggunaan ISO 14001 dikarenakan umumnya diberikan kepada perusahaan yang berkualitas

internasional terkait dengan Sistem Manajemen Lingkungan, serta sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten. Pengungkapan lingkungan dinilai berdasarkan skor dari lima kriteria yang dibuat sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti hubungan antara GCG, Kinerja lingkungan dan Pengungkapan lingkungan dengan judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” Bab V Pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, maka perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan dalam biaya perusahaan. Walaupun UU tersebut telah terbit, tetapi dibutuhkan PP sebagai peraturan pelaksana. PP No 47 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan’ baru diterbitkan di tahun 2012. Hal ini menyebabkan rentang tahun dari 2007 hingga 2012 penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih bersifat sukarela. Keadaan seperti ini dapat

dijadikan suatu pertanyaan apakah perusahaan akan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungannya hanya berlandaskan UU saja.

Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat berarti bahwa pelaksanaannya didasarkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perusahaan. Salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan pengungkapan adalah sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau sering disebut *Good Corporate Governance*. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan GCG mengharuskan perusahaan untuk memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran/kesetaraan. Setidaknya dalam pengungkapan lingkungan, perusahaan yang menerapkan prinsip GCG harus memenuhi minimal dua asas yaitu transparansi dan responsibilitas.

Transparansi perusahaan mempunyai arti bahwa perusahaan harus mempunyai laporan dari dampak perusahaan terhadap masyarakat. Informasi mengenai polusi (air, tanah dan udara) merupakan informasi yang harus diketahui oleh publik. Maka pengungkapan lingkungan seharusnya menjadi salah satu faktor yang harus diterapkan dalam GCG. Sedangkan responsibilitas, maka perusahaan harus melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud tidak hanya peraturan perusahaan, tetapi juga peraturan perundang-undangan negara dimana perusahaan tersebut berada.

Di Indonesia, GCG masih bersifat sukarela bagi perseroan terbatas. BAPEPAM sebagai badan pengawas hanya memberikan suatu alat berbentuk kuisioner *self assesment* bagi perusahaan yang ingin mengetahui seberapa baik tingkat Tata Kelola Perusahaannya. Penerapan GCG sangat penting bagi

perusahaan, karena tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kepentingan *stakeholder*.

Pengungkapan lingkungan seharusnya didasarkan pada kinerja lingkungan yang telah dilakukan perusahaan. Namun, adanya beberapa fakta yang ditemukan para pegiat lingkungan dan penelitian-penelitian mengenai ketidak signifikan hubungan pengungkapan lingkungan dan kinerjanya menyebabkan banyak pihak masih mempertanyakan keabsahan pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini akan dipermudah dengan menjabarkannya kedalam pertanyaan masalah yaitu:

1. Apakah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris dan ukuran Komite Audit memberikan dampak positif terhadap pengungkapan lingkungan?
2. Apakah kinerja lingkungan memberikan dampak positif terhadap pengungkapan lingkungan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pelaporan lingkungan dan kinerja lingkungan. Serta menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pendekatan lingkungan dan kesadaran akan pentingnya melakukan tanggung jawab sosial dalam bidang lingkungan.
2. Bagi masyarakat (investor, konsumen, agen, dan lain-lain) agar dapat digunakan sebagai pemahaman akan pentingnya kebijakan lingkungan yang diambil suatu perusahaan sebagai tanggung jawab bersama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian mempunyai maksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terbagi dalam lima bab dalam yaitu bab pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metodologi penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab penutup.

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian. Bab II merupakan tinjauan pustaka, bab ini terdiri atas landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis. Bab III merupakan metodologi penelitian, bab ini terdiri atas variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan, bab ini terdiri atas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. Sedangkan, Bab V merupakan

penutup, bab ini terdiri atas simpulan dari penelitian yang dilakukan yang telah menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian ini, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berbeda dengan teori *stakeholder* karena lebih menekankan pada interaksi perusahaan dengan masyarakat. Legitimasi dapat dikatakan sebagai pengakuan masyarakat terhadap perusahaan. Masyarakat menginginkan perusahaan untuk mengikuti aturan dalam kondisi sosial dan lingkungan yang telah diterapkan. Selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, perusahaan juga diharapkan membawa manfaat yang lebih pada kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu manfaatnya dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat sekitar.

Pengakuan masyarakat terhadap perusahaan merupakan hal utama bagi perusahaan untuk terus bertahan hidup. Apabila perusahaan menunjukkan perbedaan antara tindakan organisasi pada harapan masyarakat akan menimbulkan jurang legitimasi (*Legitimacy gap*). *Legitimacy Gap* apabila tidak dibenahi dengan menselaraskan kembali nilai perusahaan kepada nilai masyarakat dapat membuat perusahaan kehilangan legitimasinya. Hal ini dapat memperburuk citra masyarakat pada suatu perusahaan sehingga dapat mengakibatkan hilangnya pengaruh pada produk.

Hilangnya pengaruh pada produk perusahaan akan menurunkan penjualan secara signifikan sehingga mengakibatkan kemampuan memperoleh laba kecil. Rokhmi (2007, dalam Handayani, 2010) menyatakan bahwa perusahaan selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya *legitimacy gap* sehingga perusahaan tersebut dapat terus dianggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup.

Masyarakat menunjuk pemerintah sebagai untuk penyalur aspirasi dalam mengatur secara luas peran perusahaan dalam lingkungan masyarakat. Maka, mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah dapat merepresentasikan kemauan masyarakat. (Chariri & Ghazali, 2001) menyatakan bahwa perusahaan lebih cenderung untuk menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk melegitimasi aktivitas perusahaan. Pemerintah menggunakan AMDAL dan PP No 47 2012 untuk mengatur kinerja dan pengungkapan lingkungan.

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Tujuan utama dari perusahaan ialah memaksimalkan keuntungan *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud tidak hanya para pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam aktivitas bisnis maupun mengakibatkan kegagalan bisnis perusahaan. Foley (2005, dalam Garvare dan Johansson, 2010) menyatakan bahwa *stakeholder* adalah

... those entities and/or issues, which a business identifies from the universe of all who are interested in and/or affected by the activities or existence of that business, and are capable of causing the enterprise to fail, or could cause unacceptable levels of damage, if their needs are not met.

Dari definisi ini, Foley (2005, dalam Garvare dan Johansson, 2010) mengkarakteristikan *stakeholder* kedalam dua bagian yaitu sebagai cara untuk meminta perhatian untuk kepentingan mereka dan kemampuan untuk bertindak apabila keinginannya tidak dipenuhi. Agar *stakeholder* dapat meminta perhatian maka harus memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sedangkan tindakan *stakeholder* mempunyai maksud apabila tidak terpenuhi keinginannya akan terciptanya resiko kegagalan yang tinggi dalam aktivitas operasi perusahaan.

Melihat definisi yang dikemukakan oleh Foley (2005, dalam Garvare dan Johansson, 2010), maka *stakeholder* adalah pihak yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perusahaan. Hal ini untuk membedakan dengan pihak-pihak lain yang tidak memenuhi dua karakteristik *stakeholder* hanya disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengaruh *stakeholder* perlu dibedakan dengan melihat beberapa faktor seperti jenis usaha dan sistem pemerintahan. Wheeler dan Sillanpa'a' (1997, dalam Garvare dan Johansson, 2010) membagi dua *stakeholder* yaitu *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder*. *Primary stakeholder* adalah pihak yang mempunyai penguasaan langsung dari barang-barang yang diperlukan untuk membantu kebutuhan perusahaan. Pihak-pihak *primary stakeholder* adalah pelanggan, manajer, pekerja, penyuplai, pemegang saham dan pemerintah.

Sedangkan *secondary stakeholder* adalah pihak-pihak yang tidak langsung menyediakan barang-barang yang dibutuhkan perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh yang bermanfaat dibanding pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak *secondary stakeholder* adalah NGO (*Non-Government Organization*), akademis, media, lembaga peduli lingkungan, dan pihak individu atau organisasi mempunyai karakteristik *stakeholder* seperti yang dikemukakan oleh Foley (2005, dalam Garvare dan Johansson, 2010).

Di dalam permasalahan lingkungan, maka pihak *primary* maupun *secondary stakeholder* yaitu pemerintah dan lembaga peduli lingkungan (mis: *Greenpeace* dan WALHI) dapat memberikan tekanan yang lebih kepada perusahaan agar dapat memperhatikan faktor lingkungan dalam setiap aktivitas operasinya. Bahkan menurut Januarti dan Apriyanti (2005) , ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder*, yaitu:

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka.
2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan.
3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan.
4. LSM dan pecinta lingkungan main vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) sangat dipengaruhi sekali oleh struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu tersebar (*Dispersed Ownership*) dan dikendalikan oleh segelintir orang (*Concentrated Ownership*). Di Indonesia, struktur kepemilikan PT (Perseroan Terbatas) lebih mengarah kepada *Concentrated Ownership*, hal tersebut dikarenakan menganut sistem hukum Kontinental Eropa. Dengan menganut sistem hukum Kontinental Eropa, maka Indonesia menerapkan sistem pemisahan antara kepemilikan saham (*ownership*) dan manajer (kontrol).

Pemisahan antara kepemilikan saham dan manajer ternyata menimbulkan konflik kepentingan pada struktur kepemilikan tersebar. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Berle dan Means (1932) yang mengkaji tentang *corporate governance* (Surya dan Yustiavandana, 2006). Konflik kepentingan dapat menyebabkan kinerja manajemen buruk, untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu *corporate governance* yang baik.

Pada tahun 1992, *Bank of England* dan *London Stock of Exchange* membentuk Komite *Cadbury* yang bertugas untuk menyusun *corporate governance code* yang digunakan sebagai tolok ukur di berbagai negara (Surya dan Yustiavandana, 2006). Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai (Surya dan Yustiavandana, 2006) :

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapaikeseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan

dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, Manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Pada definisi diatas, terdapat dua hal yang menjadi fokus, yaitu kelangsungan hidup perusahaan dan pertanggungjawaban kepada pemilik. Kelangsungan hidup perusahaan dapat disesuaikan dengan pengkategorian pertama dalam *corporate governance* yang dilakukan oleh Stijn Claessens. Stijn Claessens (2003, dalam Surya dan Yustiavandana, 2006) menyatakan bahwa kategori pertama (kelangsungan hidup perusahaan) merupakan pola perilaku perusahaan yang diukur dengan kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perilaku terhadap pemegang saham dan *stakeholder*. Sedangkan, kategori kedua lebih mengarah pada bagaimana perbedaan dalam kerangka normatif yang dibangun akan memengaruhi pola perilaku perusahaan, investor dan lainnya.

Mengenai faktor kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan, pemerintah sebagai *stakeholder* dan regulator seharusnya dapat menekan perusahaan untuk lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan dan alam. Hal ini sejalan dengan fokus pada *corporate governance* yang dikemukakan Komite Cadbury dan sistem hukum Indonesia yang menganut *Civil Law*.

Adanya berbagai permasalahan dalam perusahaan seperti tanggung jawab perusahaan dan konflik kepentingan dalam bidang lingkungan menyebabkan perusahaan harus mempunyai *corporate governance* yang baik. Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan jawaban atas permasalahan tersebut. Penerapan praktik GCG diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Stakeholder sebagai pihak yang berpengaruh pada aktivitas perusahaan mempunyai kepentingan pada kinerja perusahaan. Dengan adanya praktik dari GCG ini, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kepentingan *stakeholder* sesuai dengan peran dan fungsi bagi kinerja perusahaan. Kepentingan perusahaan akan terpenuhi apabila mampu memenuhi kepentingan *stakeholder* karena penentuan kepentingan perusahaan ditentukan oleh *stakeholder*.

Penerapan GCG ini akan berdampak positif pada masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai pengguna produk dan jasa, tetapi juga sebagai penyedia dana bagi perusahaan (khususnya perusahaan *go public*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *stakeholder*, walaupun para kendali perusahaan dari pemegang saham masih dikuasai segelintir orang saja. Menurut Surya dan Yustiavanda (2006), kepentingan masyarakat konsumen sesuai dengan prinsip responsibilitas, bahwa perusahaan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala produk yang mereka keluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Perusahaan mempunyai dua tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu mengenai lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Dalam segi lingkungan hidup, perusahaan harus mempunyai kinerja lingkungan yang baik agar kebutuhan masyarakat pada lingkungan yang sehat terpenuhi. Manfaat untuk perusahaan adalah terselamatkan dari biaya pemulihan lingkungan yang besar.

Korelasi pemerintah, perusahaan dan masyarakat akan terjalin baik apabila penerapan GCG dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut sesuai dengan konsep GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006),

bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penerapan GCG sendiri perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa (Setiawan, 2012).

KNKG juga membuat lima asas GCG yang tercantum dalam *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* tahun 2006, yaitu (KNKG, 2006):

1. Transparansi (*Transparency*)

“Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya”.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

“Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan”.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

“Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*”.

4. Independensi (*Independency*)

“Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain”.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

“Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan”.

Agar tercipta praktik GCG, maka diperlukan organ perusahaan yang menunjangnya. Organ – organ tersebut nantinya diharapkan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Beberapa organ perusahaan tersebut adalah Dewan Komisaris dan Komite Audit.

2.1.4 Dewan Komisaris dan Komite Audit sebagai proksi GCG

2.1.4.1 Dewan Komisaris

Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. KNKG (2013) juga mendefinisikan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif sehingga keputusan Dewan Komisaris merupakan keputusan bersama Dewan Komisaris. Pembagian tugas diantara Dewan Komisaris bukan dimaksudkan untuk mengambil keputusan tetapi untuk memperdalam hal-hal yang perlu diputuskan oleh Dewan Komisaris. KNKG (2006) juga menyatakan bahwa, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Lebih lanjut lagi, KNKG (2006) menyatakan bahwa kedudukan Dewan Komisaris Utama adalah setara dengan anggota Dewan Komisaris lain, hanya Komisaris Utama bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (*primus inter pares*).

Di Indonesia, bentuk dewan dalam perusahaan menganut Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Sistem Dua Tingkat didasarkan pada Sistem Hukum Kontinental Eropa yang diterapkan oleh negara-negara seperti Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang (FCGI, Tanpa Tahun) . Indonesia menganut sistem hukum ini, karena sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda. Terdapat dua

badan yang terpisah dalam satu perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi kerja Dewan Direksi dalam mengelola dan mewakili perusahaan.

Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut ini (KNKG, 2006):

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu memiliki integritas dan kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai dengan pemberhentian sementara.

Efektivitas Dewan Komisaris diperlukan karena tugas komisaris sebagai *business oversight* yang menyangkut pemantuan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh dan berkembang (Muntoro, 2007). Lebih lanjut lagi, Muntoro (2007), menyatakan bahwa tugas lain dari Dewan Komisaris adalah melakukan *oversight* atas ketaatan perusahaan kepada undang-undang dan peraturan dan bahwa perusahaan berperilaku etis dan bermoral. Pernyataan dapat ini menjadi faktor keterlibatan Dewan Komisaris terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, didasarkan pada ketaatan pelaksanaa UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” Bab V

pasal 74. Didalam pasal tersebut disebutkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Walaupun ketentuan ini baru diwajibkan di tahun 2012 dengan PP No 47 tahun 2012, tetapi dengan dasar perilaku etis dan bermoral, diharapkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab ini sesuai dengan manfaat dan dampak yang diambil dan dilakukan perusahaan.

Untuk menciptakan efektivitas Dewan Komisaris, salah satu faktornya adalah proporsi Komisaris Independen yang ideal dalam jajaran Dewan Komisaris. Menurut Rifa'i (2009), Komisaris Independen sangat dibutuhkan agar tata kelola perusahaan lebih baik sehingga kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan lebih sedikit. Selain itu juga diharapkan Komisaris Independen tidak hanya sekedar simbol, hiasan, atau *shock therapy* bagi orang yang bermaksud tidak baik terhadap perusahaan. KNKG (2006) menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris juga menentukan efektivitas Dewan Komisaris. Menurut Muntoro (2007), untuk menjalankan tugas dengan baik, maka jumlah pas dari anggota Dewan Komisaris termasuk ketuanya perlu diperhatikan. Salah satu faktor penentunya adalah ukuran Dewan Komisaris. Faktor penentu ini dikaitkan pada proses diskusi dan negosiasi antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Menurut Muntoro (2007), ketika terjadi perselisihan dalam membahas masalah strategis, ada kemungkinan Dewan

Komisaris akan mengalami tekanan psikologis apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih sedikit dari Dewan Direksi.

Selain proporsi Komisaris Independen dan ukuran Dewan Komisaris, menurut Muntoro (2007), hal paling penting dan berpengaruh untuk menentukan efektivitas Dewan Komisaris adalah proses rapat, baik rapat internal antar anggota komisaris maupun eksternal dengan pihak direksi maupun pihak lainya. Lebih lanjut lagi, Muntoro (2007) menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris merupakan proses pengambilan keputusan bersama, sehingga diharapkan proses rapat dapat memberikan kesempatan pada semua pihak untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi terbuka tanpa merasa adanya tekanan dari pihak lain. Rapat Dewan Komisaris merupakan hal yang diperhitungkan dalam praktik GCG (*Good Corporate Governance*) mengenai keterbukaan informasi. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang “Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik”. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa informasi rapat dewan komisaris harus diungkapkan mengenai frekuensi pertemuan dan tingkat kehadirannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, efektivitas Dewan Komisaris dapat didasarkan pada tiga hal yaitu, proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris. Tiga hal tersebut kemudian dipakai peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan.

2.1.4.2 Komite Audit

Menurut peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tahun 2004, Komite Audit

adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit harus mempunyai pedoman dalam bentuk *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit). Menurut peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tahun 2004, *Audit Committee Charter* setidaknya memuat 1) tugas dan tanggung jawab serta wewenang, 2) komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, 3) tata cara dan prosedur kerja, 4) kebijakan penyelenggaraan rapat, 5) sistem pelaporan kegiatan, dan 6) ketentuan mengenai penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan. Selain itu, *Audit Committee Charter* wajib disajikan dalam halaman *website* perusahaan.

Menurut FCGI (2002, dalam Setiawan, 2012), pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, etika bisnis serta melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab dalam pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

KNKG (2006) menyatakan bahwa Komite Audit mempunyai 4 fungsi dalam membantu Dewan Komisaris, yaitu :

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
4. Temuan hasil audit ditindaklanjuti oleh manajemen.

Keanggotaan Komite Audit sesuai dengan peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tahun 2004 harus terdiri dari minimal 3 anggota yang diketuai oleh salah satu Komisaris Independen. Selain itu pula, setidaknya salah satu diantara anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Untuk menjaga independensi Komite Audit, anggota bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Konsultan Hukum, atau pihak

lain yang memberi jasa atestasi, non-atestasi, dan /atau konsultasi pada perusahaan bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir. Selain itu juga tidak diperbolehkan mempunyai saham langsung atau tidak langsung pada perusahaan publik.

Komite Audit mempunyai peran penting dalam perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Peran ini dapat dilihat dari pernyataan kedua FCGI mengenai tanggung jawab Komite Audit yaitu tindak perusahaan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika bisnis. UU No 40 Tahun 2007 Bab V pasal 74 menyatakan bahwa perusahaan wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Walaupun tanggung jawab tersebut baru diwajibkan di tahun 2012 dengan PP No 47 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan), tetapi dengan memperhatikan etika bisnis, seharusnya perusahaan akan melakukan tanpa ada melihat ada atau tidak peraturan mengenai hal ini. Untuk itu peneliti memasukan Komite Audit sebagai salah satu proksi GCG untuk dihubungkan dengan pengungkapan lingkungan.

2.1.5 Corporate Social Responsibility

Menurut Hackston dan Milne (1996, dalam Setiawan, 2012), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Proses

pengkomunikasian ini merupakan bagian terpenting bagi keberlanjutan hidup perusahaan.

Di dalam buku “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”, John Elkington (1997, dalam Wibisono, 2007) menyampaikan konsep *triple bottom line* dengan istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Elkington menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus memperhatikan 3P (*Profit, People, Planet*) apabila ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya. Prinsip 3P mempunyai maksud bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan profit saja, tetapi juga pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan ikut menjaga lingkungan.

Asas 3P mempunyai maksud sebagai berikut,

1. *Profit*. Keuntungan yang dimaksud tidak hanya didasarkan pada laba akuntansi yang didapatkan oleh perusahaan. Keuntungan yang dimaksud adalah manfaat nyata yang didapat oleh masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
2. *People*. Perusahaan harus melihat masyarakat sebagai bagian dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup disekitar pabrik. Selain itu juga, perusahaan tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi atau membahayakan masyarakat sebagai bagian dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya adalah penggunaan anak-anak dibawah umur sebagai pekerja, gaji yang adil untuk karyawan, dan jam kerja karyawan yang tidak berlebihan.

3. *Planet*. Di dalam praktiknya, perusahaan harus memberikan manfaat pada lingkungan atau setidaknya dengan tidak merusaknya dan dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan. Penggunaan energi tidak terbarukan seperti batu bara, minyak, dan gas harus digunakan se-efektif mungkin dalam proses produksi perusahaan. Dikatakan pula, perusahaan yang berasaskan Triple Bottom Line tidak akan memproduksi barang yang berbahaya seperti senjata, kimia berbahaya, baterai ber-*mercury*, dan lain-lain.

Perusahaan yang menerapkan prinsip 3P seperti menerapkan CSR secara keseluruhan, maka program CSR yang menjadi program diluar operasi perusahaan sudah tidak diperlukan, karena perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab secara menyeluruh. Namun, hal ini tidak dilakukan perusahaan karena prinsip kapitalisme yang berfokus pada keuntungan semata.

Di Indonesia, kebijakan pemerintah terhadap CSR termuat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007. Namun yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”. Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” (UU PT) Bab V Pasal 74, dinyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Diuraikan pula bahwa TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan

dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi.

2.1.6 Kinerja lingkungan

Pengukuran terhadap kinerja lingkungan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Terdapat tiga indikator yang bisa digunakan yaitu AMDAL, ISO dan PROPER. Informasi tentang AMDAL terdapat pada laporan tahunan perusahaan yang listing. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kelemahan dari penggunaan AMDAL ini menurut Lindrianasari (2007) adalah hasil AMDAL tidak dapat diketahui apakah masuk kriteria baik apa tidak.

ISO dalam bidang lingkungan adalah ISO 14001 tentang Manajemen Sistem Lingkungan. ISO 14001 merupakan bagian dalam ISO 14000. ISO 14000 merupakan standar terkait manajemen lingkungan yang bertujuan untuk membantu organisasi meminimalisasi dampak negatif dari operasional perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan ISO 14001 dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungannya masuk dalam kategori baik, karena menggunakan standar internasional dan dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten.

PROPER merupakan alat Kementrian Lingkungan Hidup untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. PROPER dilakukan dengan sistem pemeringkatan dengan pemberian warna sebagai

penandanya. Terdapat lima peringkat dalam PROPER yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam. Kinerja penataan yang dinilai dalam PROPER mencakup: penataan terhadap pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3, dan penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sedangkan penilaian untuk aspek upaya lebih dari taat meliputi penerapan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*). Kriteria peringkat PROPER disajikan dalam tabel 2.1.

Pengukuran kinerja lingkungan menggunakan PROPER lebih mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat tingkatan dari terbaik hingga terburuk dalam kinerja lingkungan perusahaan. Sehingga penilaian terhadap suatu perusahaan tidak dapat langsung dikategorikan baik atau buruk seperti penilaian menggunakan AMDAL serta ISO 14001. Selain itu, lembaga yang menilai kinerja lingkungan perusahaan merupakan lembaga yang kredibel yaitu Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat PROPER

PERINGKAT WARNA	DEFINISI
EMAS	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
HIJAU	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (<i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial

	(CSR/Comdev) dengan baik.
BIRU	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MERAH	upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi
HITAM	untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Sumber : Laporan Hasil Penilaian PROPER 2010.

2.1.7 Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna lain sebagai alat pengambil keputusan. Informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan aktivitas perusahaan, sehingga informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan tepat sasaran. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu mengambil keputusan ekonomi (Chariri & Ghozali, 2001). Perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) wajib menerbitkan laporan tahunan setiap tahun. Laporan tahunan mengungkapkan dua hal yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi tambahan yang relevan diluar ketetapan standar akuntansi. Luas pengungkapan sukarela berbeda-

beda sesuai dengan karakteristik perusahaan. Perusahaan yang bergerak pada eksploitasi lingkungan misalnya, akan mengungkapkan informasi mengenai kinerja lingkungannya, karena pihak-pihak yang berkepentingan lebih memfokuskan perhatiannya pada hal tersebut.

Pengungkapan lingkungan merupakan suatu cara perusahaan untuk menyampaikan informasi pada *stakeholder* dalam aspek bidang lingkungan. Aspek ini berkaitan langsung pada dampak yang ditimbulkan dari siklus kerja perusahaan yang meliputi input proses maupun output pada lingkungan.

Sebagai bagian dari CSR, pengungkapan lingkungan bersifat sukarela. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai alasan-alasan khusus dalam melakukan pengungkapan tersebut. Alasan-alasan tersebut setidaknya dapat dipahami didasarkan pada teori pengungkapan sukarela dan teori sosio – politikal.

Menurut Clarkson (2008, dalam Chong dan Freedman, 2011), pandangan teori sukarela menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan pengungkapan, apabila telah melakukan kinerja lingkungan yang baik. Hal yang diungkap dalam pengungkapan lingkungan lebih kepada pengurangan emisi berbahaya.

Dalam teori sosio – politikal, terdapat dua teori yang mendasari yaitu teori stakeholder dan legitimasi. Sesuai dengan teori stakeholder, Gray, Kouhy dan Lavers (1995, dalam Chong dan Freedman, 2011) menyatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan karena diminta oleh para *stakeholder* nya. Disisi lain, manajer meyakini bahwa dengan mengikuti kemauan para *stakeholder* maka mereka berharap bahwa kebutuhan informasi *stakeholder* akan terpenuhi.

Di dalam teori legitimasi, Patten (2000, dalam Chong dan Freedman, 2011) menyatakan bahwa perusahaan menginginkan berkelakuan seperti yang diinginkan masyarakat. Sehingga dengan adanya pengungkapan lingkungan, perusahaan akan membuat dirinya *legitimate* di mata masyarakat, sehingga tuntutan masyarakat akan berkurang.

Selain ketiga teori tersebut, disisi lain, dorongan kuat dari peraturan dapat memaksa perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah lingkungan, saat ini terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”, yang mempunyai maksud agar perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang termuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Walaupun pelaksanaan aturan wajib dengan didasarkan PP tersebut baru dikeluarkan di tahun 2012, tetapi sudah terdapat UU yang mendasari nya yaitu UU Nomor 40 tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga seharusnya perusahaan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Sesuai dengan teori-teori yang mendasari maka pengungkapan lingkungan dapat didasarkan pada kinerja lingkungannya dan pemenuhan keinginan *stakeholder*. Didasarkan pada teori pengungkapan sukarela dan legitimasi, maka perusahaan dapat mengungkapkan lingkungan sesuai dengan kinerja

lingkungannya atau dapat pula mengungkapkan lingkungan untuk menangkap sinyal baik dari masyarakat agar dikatakan perusahaan yang “*legitimate*”.

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keinginan *stakeholder* nya. Agar dapat tercapai maka dibutuhkan perusahaan yang mempunyai akuntabilitas yang baik. Sehingga perusahaan yang akuntabilitasnya baik akan lebih luas dalam pengungkapannya dibanding dengan yang akuntabilitasnya buruk. Sebuah perusahaan yang mempunyai akuntabilitas yang baik dipastikan juga mempunyai tata kelola perusahaan yang baik pula.

Dalam mengungkapkan lingkungan, terdapat banyak standar yang digunakan. Setiawan (2012) mengatakan bahwa pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia menggunakan standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI merupakan organisasi nirlaba yang mempopulerkan keberlanjutan ekonomi. GRI didirikan di Boston di tahun 1997 dan merupakan gabungan dari organisasi CERES (*Coalition for Environmentally Responsible Economies*) dan *the Tellus Institute*. Dikarenakan fungsi GRI dalam mempopulerkan keberlanjutan ekonomi, maka GRI membuat suatu standar laporan keberlanjutan atau yang sering disebut G (*Guidelines*). Laporan G pertama dipublikasi di tahun 2000 dengan nama G, sedangkan laporan terakhir (laporan ketiga) yang dipublikasikan di tahun 2011 diberi nama G3.1. Menurut *Database Global Reporting*, telah terdapat 4000 organisasi dari 60 negara yang menggunakan G (*Guidelines*) untuk membuat laporan keberlanjutannya.

Dalam GRI terdapat enam indikator pengungkapan yaitu ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan produk. Dalam

penelitian ini, digunakan indikator lingkungan GRI. Berdasarkan indikator ini, terdapat 30 item yang akan dicocokkan dengan laporan pengungkapan lingkungan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Lindrianasari (2007) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja lingkungan memberikan pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Data dari penelitian ini adalah delapan puluh delapan perusahaan yang terdaftar di BEI dan PROPER pada tahun 2004. Hasilnya terdapat pengaruh antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan, tetapi tidak ada hubungan antara pengungkapan lingkungan dan kinerja ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Handayani (2010) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan kinerja dalam hal lingkungan sepadan dengan pengungkapannya serta pengaruh terhadap kinerja ekonominya. Data penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada tahun 2008-2010. Variabel dari penelitian ini ialah pengungkapan lingkungan, *economic performance*, dan *environmental performance*. Hasilnya ialah tidak terdapat hubungan antara ketiganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chong dan Freedman (2011) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan. Data dari penelitian ini ialah

50 perusahaan yang merupakan penghasil polusi terbesar dari 1897 perusahaan. Variabel dari penelitian ini ialah Gov_Score pada (Brown and Caylor, 2006), ukuran polusi, dan skor dari kriteria pengungkapan lingkungan. Hasilnya tidak terdapat hubungan antara good governance pada *environmental performance*, tetapi terdapat hubungan dengan pengungkapan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2012) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik *Good Corporate Governance* dan manajemen laba memberikan pengaruh terhadap *Corporate Environmental Disclosure*. Data dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI dan PROPER Tahun 2008-2010. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tidak hanya 1 komponen GCG yaitu jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Environmental Disclosure*.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Lindrianasari (2007)	<ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): Kinerja Ekonomi dan Pengungkapan lingkungan • Dependen (Y): Pengungkapan lingkungan dan Kinerja lingkungan 	Analisis Regresi 3 SLS (<i>Staged Least Square</i>)	Hasilnya terdapat hubungan signifikan dan positif diantara Kinerja Ekonomi terhadap Kinerja lingkungan dan Pengungkapan lingkungan, serta Pengungkapan lingkungan terhadap Kinerja Ekonomi
2.	Handayani (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): <i>Environmental Disclosure</i> dan <i>Economic Performance</i> • Dependen (Y): <i>Environmental</i> 	Analisis Regresi OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	Tidak Terdapat Hubungan Signifikan <i>Environmental performance</i> Terhadap <i>Environmental Disclosure</i> Dan <i>Economic Performance</i> Serta <i>Environmental</i>

		<i>Perfomance dan Environemntal Disclosure</i>		Disclosure Terhadap Economic Performance
3.	Chong dan Freedman (2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): <i>Good Corporate Governance, Environmental Perfomance, dan Environmental Disclosure</i> • Dependens (Y): <i>Environmental Perfomance dan Environemntal Disclosure</i> 	Analisis Regresi OLS (Ordinary Least Square)	Hasilnya terdapat hubungan antara <i>Good Corporate Governance</i> hubungan dengan <i>Environemntal Disclosure</i>
4.	Setiawan (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): Praktik <i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen Laba • Dependens (Y): <i>Environmental Disclosure</i> 	Analisis Regresi Berganda	Hasilnya hanya 1 proksi GCG yaitu Rapat Dewan Komisaris yang berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i>

Sumber : Data Sekunder yang Diolah tahun 2013

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti memodifikasi antara penelitian Chong dan Freedman (2011) dan Setiawan (2012). Peneliti hanya menggunakan variabel GCG dan kinerja lingkungan untuk melihat pengaruhnya pada pengungkapan lingkungan, tidak melihat hubungan antar variabel seperti penelitian Chong dan Freedman (2011). Selanjutnya, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, pengukuran variabel GCG dan kinerja lingkungan dilakukan seperti pada penelitian Setiawan (2012).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

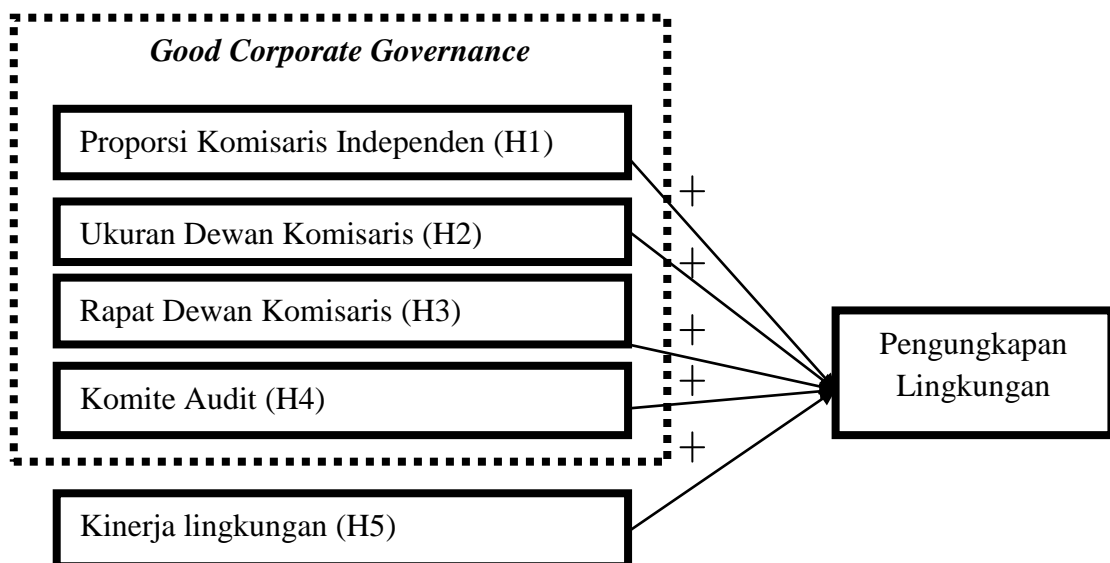
Hubungan antara GCG dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan dalam teori legitimasi dan *stakeholder*. Di dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa perusahaan harus dipandang *legitimate* agar perusahaan dapat hidup berkelanjutan. Perusahaan yang *legitimate* berarti sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu harapan masyarakat adalah fokus perusahaan pada tanggung jawab lingkungan, sehingga diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai hal tersebut. Ketika perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungan (kinerja lingkungan), perusahaan juga akan melakukan pengungkapan lingkungan, karena sebagai bentuk pengkomunikasian dari perusahaan kepada masyarakat serta sinyal positif dari masyarakat.

Di dalam teori stakeholder dikatakan bahwa perusahaan harus meningkatkan nilai stakeholdernya. Diperlukan GCG agar perusahaan dapat meningkatkan nilai stakeholdernya. Foley (2005, dalam Garvare dan Johansson, 2010) menyatakan bahwa stakeholder dibagi kedalam 2 kategori (yaitu *Primary Stakeholder* dan *Secondary Stakeholder*) sesuai dengan peran dan dampaknya bagi perusahaan. Salah satu *primary stakeholder* adalah pemerintah. Lebih lanjut lagi, menurut Foley (2005, dalam Garvare dan Johansson, 2010), agar tercapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai stakeholder, maka diperlukan kesinambungan antara perusahaan dan *stakeholder*-nya dalam hal ini pemerintah. Dalam hal lingkungan, maka pemerintah dapat berperan sebagai badan regulator yang bertujuan untuk memastikan perusahaan melaksanakan tanggung jawab

lingkungannya (kinerja lingkungan). Dengan adanya UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” pasal 79 Bab V tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” diharapkan perusahaan akan melakukan kinerja lingkungan walaupun peraturan pelaksana yaitu PP No 47 baru diterbitkan di tahun 2012.

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah proksi dari *Good Corporate Governance* dan kinerja lingkungan. Sedangkan variabel dependen adalah pengungkapan lingkungan. Ukuran yang digunakan dalam variabel *Good Corporate Governance* tidak menggunakan skor yang dibuat oleh suatu lembaga independen maupun penelitian terdahulu seperti penelitian Chong dan Freedman (2011), tetapi menggunakan ukuran proksi pada penelitian Setiawan (2012) dengan menambahkan beberapa proksi. Proksi tersebut adalah proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk mempermudah penelitian kerangka teoritis disusun dan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan lingkungan

KNKG (2006) menyatakan bahwa, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh karena itu, Dewan Komisaris dapat memaksakan pengungkapan yang dalam hal ini adalah pengungkapan CSR yang merupakan bagian praktik GCG.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, Dewan Komisaris dapat terdiri dari pihak terafiliasi dan tidak terafiliasi atau yang sering disebut Komisaris Independen. Maksud dari pihak yang tidak terafiliasi adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Sesuai dengan penerapan prinsip GCG dalam perusahaan, maka perusahaan memerlukan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris. Istilah independen pada Komisaris Independen maupun direksi bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lain tidak independen. Istilah ini hanya menunjukkan keberadaan sebagai wakil dari pemegang saham independen (saham minoritas) (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Menurut Rifa'i (2009), Komisaris Independen sangat dibutuhkan agar tata kelola perusahaan lebih baik sehingga kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan lebih sedikit. Selain itu juga diharapkan Komisaris Independen tidak

hanya sekedar simbol, hiasan, atau *shock therapy* bagi orang yang bermaksud tidak baik terhadap perusahaan. KNKG (2006) menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, Komisaris Independen sebagai bagian Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan harus tercantum dalam rencana kerja tahunan perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menyatakan perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam diharuskan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan

2.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002 dalam Setiawan, 2012).

Untuk dapat membangun Dewan Komisaris yang efektif, terdapat banyak faktor seperti rekrutmen dan orientasi, ukuran dan komposisi, rapat komisaris, dsb. Ukuran (size) adalah jumlah yang pas dari dalam anggota Dewan Komisaris, termasuk ketuanya untuk menjalankan tugasnya dengan baik (Muntoro, 2007). Selain itu juga, Muntoro (2007) menyatakan bahwa ukuran yang pas juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu:

1. Ukuran Dewan Direksi
2. Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan
3. Keseluruhan resiko (*Overall risk*) yang dihadapi
4. Komite yang ada

Faktor pertama yaitu ukuran Dewan Direksi, dapat dikategorikan sebagai faktor psikologis dalam penentuan ukuran Dewan Komisaris. Menurut Muntoro (2007), hal ini dikarenakan apabila Dewan Komisaris yang berjumlah lebih sedikit mengadakan suatu rapat dengan Dewan Direksi, kemudian terjadi perbedaan pendapat, maka ada kemungkinan Dewan Komisaris akan mengalami tekanan

psikologis. Sehingga untuk memperkecil kemungkinan tersebut, jumlah Dewan Komisaris paling tidak sama dengan Dewan Direksi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan lingkungan

2.4.3 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan lingkungan

Rapat Dewan Komisaris merupakan faktor penting dalam efektivitas Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris merupakan hasil keputusan bersama baik antara sesama anggota Dewan Komisaris, atau dengan Dewan Direksi untuk menentukan kebijakan perusahaan. Proses rapat Dewan Komisaris (*board process*) yang baik harus diakhiri dengan membacakan kesimpulan dan keputusan rapat. Hal ini digunakan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai kesimpulan dan keputusan rapat bagi semua anggota rapat, dan dapat dijadikan sebagai dokumen formal untuk mengambil langkah-langkah yang disetujui dalam rapat (Muntoro, 2007).

Penelitian Setiawan (2012) menemukan bahwa rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi Dewan Komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan

dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan lingkungan akan semakin luas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan lingkungan

2.4.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Laporan Lingkungan

Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang “Komite Audit” menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit tidak hanya harus terdapat di dalam perusahaan publik saja, tetapi menurut KNKG (2006), perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit.

Komite Audit terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dengan diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Anggota Komite Audit diharapkan dapat bertindak secara independen karena fungsinya sebagai penghubung antara

Dewan Komisaris dengan internal auditor. Struktur anggota Komite Audit diharapkan sesuai dengan besar dan kecil organisasi serta tanggung jawab yang diemban.

Menurut Surya dan Yustiavanda (2006), Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Hal ini disebabkan karena peran pengawasan dan akuntabilitas Dewan Komisaris belum memadai. Lebih lanjut, Surya dan Yustavanda (2006) menyatakan bahwa Komite Audit bertugas dalam pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.

Di dalam pedoman GCG, Hasnati (2003, dalam Surya dan Yustiavanda, 2006) menyatakan bahwa salah satu tugas Komite Audit adalah melaksanakan pengawasan intern agar tanggung jawab perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan mengenai perundang undangan di bidang Pasar Modal dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, hal ini merujuk pada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tahun 2004.

Keberadaan Komite Audit dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari resiko yang dapat memperburuk kinerja perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang lingkungan juga dapat terhindar dari sanksi yang diberikan pemerintah apabila melaksanakan perundang-undangan salah satunya adalah PP No 47 tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sehingga hal tersebut dapat sesuai dengan penelitian Focker (1992, dalam

Setiawan, 2012) yang menyebutkan bahwa Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Laporan Lingkungan

2.4.5 Pengaruh Kinerja lingkungan terhadap Luas Pengungkapan Laporan Lingkungan

Menurut Berry dan Rondinelle (1998), perusahaan yang maju sekarang melihat kinerja lingkungan sebagai alat untuk menambah nilai etika di masyarakat, memenuhi perlindungan terhadap pekerja, respon atas kebijakan pemerintah dan *stakeholder*, dan membangun kebijakan bisnis baru dalam rangka untuk tetap kompetitif di dalam persaingan pasar dunia. Hal ini menyebabkan perusahaan harus meningkatkan kualitas kinerja lingkungannya, agar perusahaan dapat terus hidup berkelanjutan.

Perusahaan yang menerapkan kinerja lingkungan dapat dipastikan akan melakukan pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkunganpun akan semakin luas akibat dari peran kinerja perusahaan yang besar. Selain sebagai kepatuhan terhadap undang-undang, pengungkapan lingkungan digunakan sebagai

peningkatan nilai di mata masyarakat sehingga perusahaan dikatakan *legitimate*. Namun, menurut Chong dan Freedman (2011), perusahaan mengungkapkan laporan lingkungan yang luas lebih cenderung untuk mendapatkan “sinyal” baik dibandingkan dengan fakta kinerja lingkungannya. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian yang menyatakan tidak adanya hubungan antar kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan.

Belum adanya hubungan yang pasti karena hasil penelitian berbeda-beda akhirnya melahirkan berbagai macam pendapat. Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa hubungan yang beragam mengindikasikan bahwa pengungkapan lingkungan tidak berdasarkan kinerja lingkungan yang sebenarnya. Lebih lanjut, Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa penemuan ini pada akhirnya mendukung teori *stakeholder*, tetapi menolak teori pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan apabila teori pengungkapan sukarela yang diterapkan maka perusahaan akan lebih baik kinerja lingkungannya, serta pengungkapan lingkungannya akan semakin luas.

Disisi lain terdapat beberapa penelitian yang membuktikan adanya pengaruh signifikan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan Lindrianasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa pengungkapan lingkungan yang luas dipengaruhi oleh kinerja lingkungan yang baik pula.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan

Laporan Lingkungan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah pengungkapan lingkungan, sedangkan variabel independennya ialah proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, Komite Audit dan kinerja lingkungan.

3.1.1 Pengungkapan lingkungan

Pengungkapan lingkungan adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan lingkungan diukur dengan skor sesuai dengan kriteria pengungkapannya. Kriteria pengungkapan lingkungan didasarkan pada pedoman indeks CSR yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*).

Hal ini dikarenakan penilaian CSR menggunakan pedoman indeks GRI telah berlaku secara internasional serta telah digunakan di banyak negara. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item).

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah indikator kinerja lingkungan (30 item). Kinerja lingkungan mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah lingkungan dan dampak dari produk dan jasa.

Pengukuran pengungkapan lingkungan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$PEL = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

3.1.2 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Proporsi Komisaris Independen diukur dengan membagi antara jumlah anggota Komisaris Independen dengan total anggota Dewan Komisaris di perusahaan.

$$PRKOM = \frac{\text{Jumlah anggota komisarsi independen perusahaan}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris di perusahaan}}$$

3.1.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris merupakan perbandingan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi. Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan membagi antara total anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan total anggota Dewan Direksi di perusahaan.

$$\text{UKDKOM} = \frac{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris di perusahaan}}{\text{Jumlah anggota Dewan Direksi di perusahaan}}$$

3.1.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat Dewan Komisaris diukur menggunakan skala nominal yaitu dengan menghitung jumlah rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada laporan tahunan perusahaan.

3.1.5 Ukuran Komite Audit

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran Komite Audit diukur menggunakan skala interval yaitu dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan dibagi dengan jumlah maksimal anggota Komite Audit perusahaan sampel.

$$\text{KOMIT} = \frac{\text{Jumlah anggota Komite Audit di perusahaan}}{\text{Jumlah anggota minimal Komite Audit sesuai peraturan BAPEPAM}}$$

3.1.6 Kinerja lingkungan

Kinerja lingkungan perusahaan diukur dari PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). PROPER merupakan program KLH untuk menilai prestasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. PROPER menggunakan peringkat untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Terdapat

lima (5) kategori yang ditandai dengan warna-warna sebagai pemeringkatnya. Urutan peringkat dari yang terkecil ke yang terbesar dalam PROPER adalah hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Kriteria dalam peringkat PROPER sebagai berikut

1. Peringkat “Emas” (Skor 5)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan

2. Peringkat “Hijau” (Skor 4)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

3. Peringkat “Biru” (Skor 3)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peringkat “Merah” (Skor 2)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi

belum mencapai persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peringkat “Hitam” (Skor 1)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.

Dalam penelitian ini digunakan data ordinal yaitu pengukuran kinerja lingkungan menggunakan skor 1 hingga 5 PROPER.

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan PROPER. Sampel penelitian ini diambil dengan teknik *pusposive sampling* yaitu perusahaan manufaktur dan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada tahun 2009-2011 dan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) pada tahun 2009-2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk publikasi. Jenis data sekunder ini dipilih untuk menghemat waktu dan biaya serta data yang diperoleh lebih valid. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa publikasi laporan

keuangan tahunan masing-masing perusahaan per Desember tahun 2009-2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data PROPER tahun 2009-2011 yang diambil dari situs Kementerian Lingkungan Hidup.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka. Untuk mendapatkan data mengenai proksi GCG, kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dokumen laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan PROPER. Sebagai tambahan, untuk pengungkapan lingkungan, digunakan instrumen penelitian berupa *check list* item pengungkapan sesuai indikator lingkungan GRI.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009).

3.5.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi. Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square-OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimate-BLUE*).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Alat uji yang digunakan adalah dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{Tolerance}$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolinearitas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini diuji dengan Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut terhadap variabel independen (Gujarat, 2003 dalam Ghozali, 2009). Variabel dengan nilai signifikansi diatas 0,05 menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Run Test. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara *random*

(Ghozali, 2011). Model yang baik apabila nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga data dapat dikatakan *random*.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted R² bernilai negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol.

3.5.4 Uji Statistik F

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian simultan terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen

maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda ini dipakai karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik) dengan software SPSS. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Uji yang dilakukan adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien dengan t tabel, dengan tingkat signifikansi 5%. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan diuji adalah sebagai berikut :

$$PELit = \alpha_0 + \alpha_1 PRKOMINit + \alpha_2 UDKOMit + \alpha_3 RPDKOMit + \alpha_4 UKITit + \alpha_5 KLit + e$$

Dimana:

PELit	= Pengungkapan lingkungan
α_0	= Konstanta
$\alpha_1 - \alpha_6$	= Koefisien
PRKOMINit	= Proporsi Komisaris Independen
UDKOMit	= Ukuran Direksi
RPDKOMit	= Rapat Dewan Komisaris
UKITit	= Ukuran (jumlah) Komite Audit
KLit	= Kinerja lingkungan
e	= Error